



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAM'ANI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS**
3. NHK : **462697**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.544.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/84 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 14 m²/14 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/110 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/360 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 840.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/328 m² di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 892.000.000
6. Tanah Seluas 102 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 102.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 200.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 15.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 126.651.102****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 2.886.151.102****III. HUTANG****Rp. 1.585.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.301.151.102**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.